

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR**POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL****DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH:**LUKMANUL HAKIM****NIM. 02170611075****PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN****FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI****SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****2025**



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : LUKMANUL HAKIM

Nim : 02170611075

Program Studi : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

Judul Tugas Akhir : POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

Pekanbaru, 16 April 2025

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Dr. Khairil Henry, SE, M.Si. Ak
NIP. 19751129 200801 1 009

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PRODI



Dr. H. Mulyani, SE, MM
NIP. 19700828 199903 2 001

Dr. Jhon Afizal, S.HI. MA
NIP. 19790911 201101 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : LUKMANUL HAKIM
NIM : 02170611075
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VIII (DELAPAN)
JUDUL : POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
 PELALAWAN
TANGGAL UJIAN : 25 MARET 2025

Tim Penguji

Ketua

Dr. Jhon Afrizal, S.Hi., MA
NIP. 19790911 201101 1 003

Sekretaris

Rony Jaya S, Sos., M.Si
NIP. 1990032 4202321 1 033

Penguji I

Muslim, S.Sos, M.Si
NIP. 19820205 201503 1 002

Penguji II

Fatimah Zuhra, S.Si., M.stat
NIP. 19880718 202012 2 018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/ 2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lukmanul Hakim
NIM : 02170611075
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkalan Kerinci, 31 Desember 2002
Prodi : D-III Administrasi Perpajakan

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi~~/Karya Ilmiah lainnya*: **"POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN"**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi~~/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi~~/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi~~/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 APRIL 2025

Yang membuat pernyataan



Lukmanul Hakim
NIM. 02170611075



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

OLEH

LUKMANUL HAKIM

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari sampai Bulan Maret tahun 2025 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tentang Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan. Pajak merupakan kontribusi wajib bagi orang pribadi atau badan dan salah satu penerimaannya terutama pada daerah guna untuk meningkatkan kepentingan dan kebutuhan daerah. Penerimaan pajak merupakan bentuk tanggung jawab setiap orang yang memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Adapun faktor yang menghambat dalam penerimaan pajak seperti kurang nya kesadaran pribadi dan selalu ingin menghindari pajak dan masih ada juga wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan skunder, yang metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Kata Kunci :Potensi Pajak, Pendapatan Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

BY

LUKMANUL HAKIM

His research was conducted from Februari to Marc 2025 at the Pelelawan Regency Regional Revenue Agency Office. This research was conducted with the aim and objective of fulfilling the potential for hotel tax revenue in the Regional Revenue Agency of Pangkalan kerinci City. Tax is a mandatory contribution for individuals or bodies and one of the revenues, especially in the regions, in order to increase regional interests and needs. Tax revenue is a form of responsibility for every person who has the obligation to pay and report their taxes. There are factors that hinder tax revenue, such as a lack of personal awareness and always wanting to avoid taxes, and there are still taxpayers who do not register themselves as taxpayers. This research uses primary and secondary data types the data collection method is by means of interviews and documentation.

Keywords: *Tax Potensial, Regional Income*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan" Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar Ahli Mahdiyah (A.Md) pada program studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat dan salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengubah Alam jahiliyah menjadi kemerdekaan demi kemajuan dan kedamaian umatnya dan untuknya selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan nanti di yaumul qiyamah. Penulis memahami bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat disusun dengan baik atas dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya melalui Tugas Akhir ini kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, ayahanda Masfar dan ibunda Rini Hartati, yang telah membiayai penulis dari sekolah hingga sampai ke jenjang perkuliahan serta selalu mendoakan, mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan Perkuliahan dan Tugas Akhir ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM.
3. Ketua Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA.
4. Sekretaris Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Muslim, S.Sos, M.Si.
5. Bapak Khairil Henry, S.E., M.Si. Ak. sebagai dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam perbaikan dan penyempurnaan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
6. Kepada seluruh Dosen dan Pegawai D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
7. Kepada seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan yang telah mengizinkan penulis untuk mengambil data di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
8. Kepada seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan, yang telah membantu dalam mempermudah pengambilan data yang diperlukan bagi penulis serta bantuan dalam memberikan nasehat dalam penulisan Tugas Akhir.
9. Kepada teman-teman Administrasi Perpajakan kelas A yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebahagiaan, suka duka dan juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan-bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan dan pada saat penulisan Tugas Akhir.

10 Dan kepada seluruh pihak yang memberikan nasehat dan dorongan kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir.

Semoga segala dukungan, bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang memerlukannya kedepannya.

Pekanbaru, Feb 2025

Penulis,

LUKMANUL HAKIM



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Lokasi Penelitan	7
1.5.2. Waktu Penelitian.....	7
1.5.3. Jenis Data.....	8
1.5.4. Metode Pengumpulan Data	8
1.5.5 Analisis Data.....	8
1.6 Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM	10
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pangkalan Kerinci.....	10
2.2 Visi dan Misi.....	11
2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	12
2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan	13
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	31
3.1 Tinjauan Teori	31
3.1.1. Pengertian Pajak	31
3.1.2. Fungsi Pajak	31
3.1.3. Asas Pemungutan Pajak.....	32
3.1.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	33
3.1.5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	3.1.6. Pajak Daerah.....	36
	3.1.7. Pajak Hotel	38
	3.1.8. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Hotel	39
	3.1.9. Objek Pajak Hotel dan Tidak Termasuk Objek Pajak Hotel.....	39
	3.1.10. Subjek dan Wajib Pajak Hotel	40
	3.1.11. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak	40
	3.1.12. Pajak Menurut Islam.....	40
	3.2. Tinjauan Praktek	42
	3.2.1 Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan	43
	3.2.2 Kendala Dalam Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan	45
	3.2.3 Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pangkalan Kerinci	46
	BAB IV PENUTUP	49
	4.1 Kesimpulan.....	49
	4.2 Saran.....	51
	DAFTAR PUSTAKA.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	2
Tabel I.2	3
Tabel I.3	4
Tabel III.1	43
Tabel III.2	44



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	12
------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tugas otonomi daerah Indonesia adalah memastikan kesejahteraan dan kemakmuran penduduknya. Untuk mewujudkan pembangunan nasional, segala potensi dan sumber daya yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien secara konsisten. Hal ini terlihat pada pemerintah pusat karena pemerintah daerah diberi otonomi untuk mengelola wilayahnya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan di Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dijalankan sampai dengan era otonomi daerah. Penetapan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah maupun tentang pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 menyebutkan bahwa Pajak Daerah, yang mengatakan Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah merupakan sebagai salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat digunakan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan setiap daerah yang diberikan kewenangan lebih luas yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Salah satunya pada Undang-Undang No 28 tahun 2009 yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan dan memaksimalkan pajak daerah, salah satunya adalah Pajak hotel.

Tabel I.1

Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan 2022-2024

No	Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Hotel
1	2022	19
2	2023	19
3	2024	20

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar di Kota Pangkalan Kerinci adalah terus meningkat. Pada tahun 2022 jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar sebanyak 19, pada tahun 2023 tetap pada status 19, pada tahun 2024 mengalami kenaikan lagi sebesar 20.

hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran dengan kategori seperti motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dan tarif pajak hotel yang ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh Persen) dan Tarif Pajak Rumah Kost ditetapkan sebesar 2.5% (dua koma lima persen).

Tabel I.2
Target dan Realisasi penerimaan pajak hotel di Badan Pendapatan Asli Kabupaten Pelalawan 2022-2024

No	Tahun pajak	Target	Realisasi	Persen(%)
1	2022	1.650.000.000	2.122.602.756	128%
2	2023	2.280.200.000	2.685.506.072	117%
3	2024	3.450.000.000	3.037.351.478	88,1%

Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan sektor pajak hotel yang terealisasi di Kota Pangkalan Kerinci terus meningkat. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan mencapai target realisasi 2.122.602.756 dengan persentase 128% dan di tahun 2023 juga mengalami penurunan realisasi sebanyak 2.685.506.072 dengan persentase 117% sedangkan di tahun 2024 terjadi peurunan yang tidak mencapai target dengan target 3.450.000.000 tetapi dengan realisasi 3.037.351.478 dengan persentase 88,1%.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan otonomi daerah yaitu setiap daerah wajib meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai daerahnya. Peningkatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bagus sehingga dapat terciptanya tata pemerintah yang baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa hal yang harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD.

Tabel I.3
Target Realisasi PAD 2022-2024

No	Tahun Pajak	Target	Realisasi	Persen
1	2022	2.542.855.000.000	38.005.738.692	1,49%
2	2023	116.357.680.000	99.079.919.964	85,2%
3	2024	62.877.338.000	39.321.196.034	62,5%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2024

Jumlah dari target realisasi PAD mengalami naik turun walaupun masih belum mencapai target yang di inginkan, tetapi upaya terus dilakukan dari tahun ke tahun sehingga masih dapat di tingkatkan lagi dan mencapai target.

Pajak Hotel di kota Pangkalan Kerinci terus meningkat dari tahun ke tahun terutama dalam tiga tahun terakhir di karenakan Kota Pangkalan Kerinci tempat jalur perdagangan, pariwisata, pemerintahan dan juga sebagai pusat kota Provinsi Riau, menyebabkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak infestor/pengusaha baik dari dalam maupun dari luar yang masuk dan membuka usaha di kota Pangkalan kerinci. Mengingat bahwa Hotel merupakan fasilitas yang sangat penting terutama Kota Pangkalan Kerinci sudah banyak memiliki tempat wisata dan ini juga dapat memancing para wisatawan untuk datang ke Pangkalan Kerinci. Perkembangan jumlah hotel pun cukup meningkat beberapa tahun dan memiliki potensi yang sangat baik karena di dukung letak Kota Pangkalan Kerinci yang sangat strategis.

Kota Pangkalan Kerinci merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Riau yang merupakan salah satu daerahnya memanfaatkan pendapatan untuk meningkatkan kemajuan daerahnya. Besarnya pendapatan awal daerah menunjukkan tingkat perekonomian yang baik di daerah tersebut. Salah satunya yaitu penerimaan pajak hotel di Kota Pangkalan Kerinci yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kota Pangkalan Kerinci saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat terutama pada hotel di daerah Kota Pekanbaru yang mana saat ini Kota Pangkalan Kerinci sudah banyak tempat tempat wisata yang menarik perhatian wisatawan hal ini membuat banyaknya infestor atau pengusaha pengusaha yang ingin membangun usahanya di lingkungan penginapan terutama pada hotel. Hal ini akan menjadi salah upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel hotel di daerah Kota Pangkaln Kerinci tidak hanya itu pemerintah juga selalu mengawasi dan memeriksa wajib pajak yang belum mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak atau belum membayarkan dan melaporkan pajaknya. Satuan Tugas (Satgas) lapangan selalu



melakukan pemantauan untuk mengatasi hal tersebut ini merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak hotel.

Maka dari itu uraian di atas menjadi dasar penulis dalam melaksanakan penelitian tentang penerimaan pajak hotel dengan judul **“Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana potensi penerimaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan?
2. Apa saja kendala dalam pemungutan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemungutan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, menjadi bahan tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada program studi D3 Administrasi Perpajakan dan memahami peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi mahasiswa, merupakan kesempatan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari.
3. Bagi instansi, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan Pajak Hotel.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan yang beralamatkan Jl Sultan Syarif Harun, Pangkalan Kerinci Barat., Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau 28654.

1.5.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai bulan Februari sampai dengan Maret 2025



1.5.3. Jenis Data

- a. Data Primer adalah data dan informan yang diperoleh secara langsung dari informan pada saat penelitian. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Sub bagian kepala bidang Kantor Badan Pendapatan Daerah Pangkalan Kerinci.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau data yang tidak langsung diperoleh peneliti tersedia. Data tersebut dalam bentuk catatan, dokumen, arsip-arsip dan buku-buku..

1.5.4. Metode Pengumpulan Data

- a. *Interview* (Wawancara), merupakan penulis melakukan kegiatan tanya jawab. Yang mana dalam hal ini penulis mewancarai langsung.
- b. Observasi, yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati lebih dekat mengenai masalah yang diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen dan gambar yang berupa laporan yang berguna untuk menunjang penulisan tugas akhir.

1.5.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada, yaitu dengan metode deskriptif. Suatu cara menyusun data yang sudah ada sedemikian rupa kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan teori yang sudah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh dan mendukung, kemudian diambil satu kesimpulan dan diakhiri dengan mengemukakan saran yang dianggap perlu.

1.6 Sistematika Pembahasan

Untuk keperluan penyusunan ini nantinya, maka secara umum penulis menguraikan kedalam empat Bab yang masing masing **Bab** menjadi **SubBab** sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan Bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan yang diakhiri sistematika pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Merupakan uraian tentang gambaran dan struktur organisasi instansi pemerintahan Badan Pendapatan Daerah Kota Pangkalan Kerinci.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Merupakan uraian teori yang mendukung penulisan penelitian ini, disini akan dibahas mengenai telaah pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran bermanfaat bagi instansi pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kota Pangkalan Kerinci

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

Sejarah Perkembangan Dinas Pendapaan Daerah Kabupaten Pelalawan, Embrio dimulai dibentuknya suatu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 09 Tanggal 17 Desember 2012.

Kemudian Sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah secara berdaya guna serta dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang pokok pokok pengelolaan Keuangan Daerah, maka ditetapkan pembentukan susunan organisasi dan tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan tanggal 17 Desember 2012. Sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan bertempat di Komplek Perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya tergabung dengan Dinas Pengeloan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang berkantor di Komplek Perkantoran Bupati Pelalawan.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan menghormati jasa-jasa pahlawannya, Pemahaman dari pernyataan Proklamator Bangsa kita ini dapat dikaitkan untuk skala yang lebih kecil kalimat tersebut pendek tetapi memiliki makna yang berdampak luar biasa bila dapat di hadirkan dalam skala yang terkecil sekecilpun. Sebagai pelaku sejarah, tidak jarang kita melihat antar pelaku sejarah melakukan koreksi terhadap pelaku sejarah lain maka tidaklah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mengerankan bagi Negara kita jika sering menemukan penyimpangan fakta dalam sejarah hal inilah yang mengilhami kita bahwa kita harus memahami sejarah, karena dalam menghargai dan menguasai sebagai modal kedepan dalam menentukan arah kedepan arah pergerakan Dinas Pendapatan.

Dalam Meningkatkan peranan dinas, maka usaha kaerah penyempurnaan organisasi setiap tahunnya terus di upayakan agar bisa memperluas jangkauan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Wajib Pajak), dengan ini kami mengharapkan akan dibentuknya kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.

2.2 Visi dan Misi

a. Visi

“ TERWUJUDNYA PENDAPATAN DAERAH YANG AKUNTABEL MENUJU KEMANDIRIAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT KABUPATEN PELALAWAN”

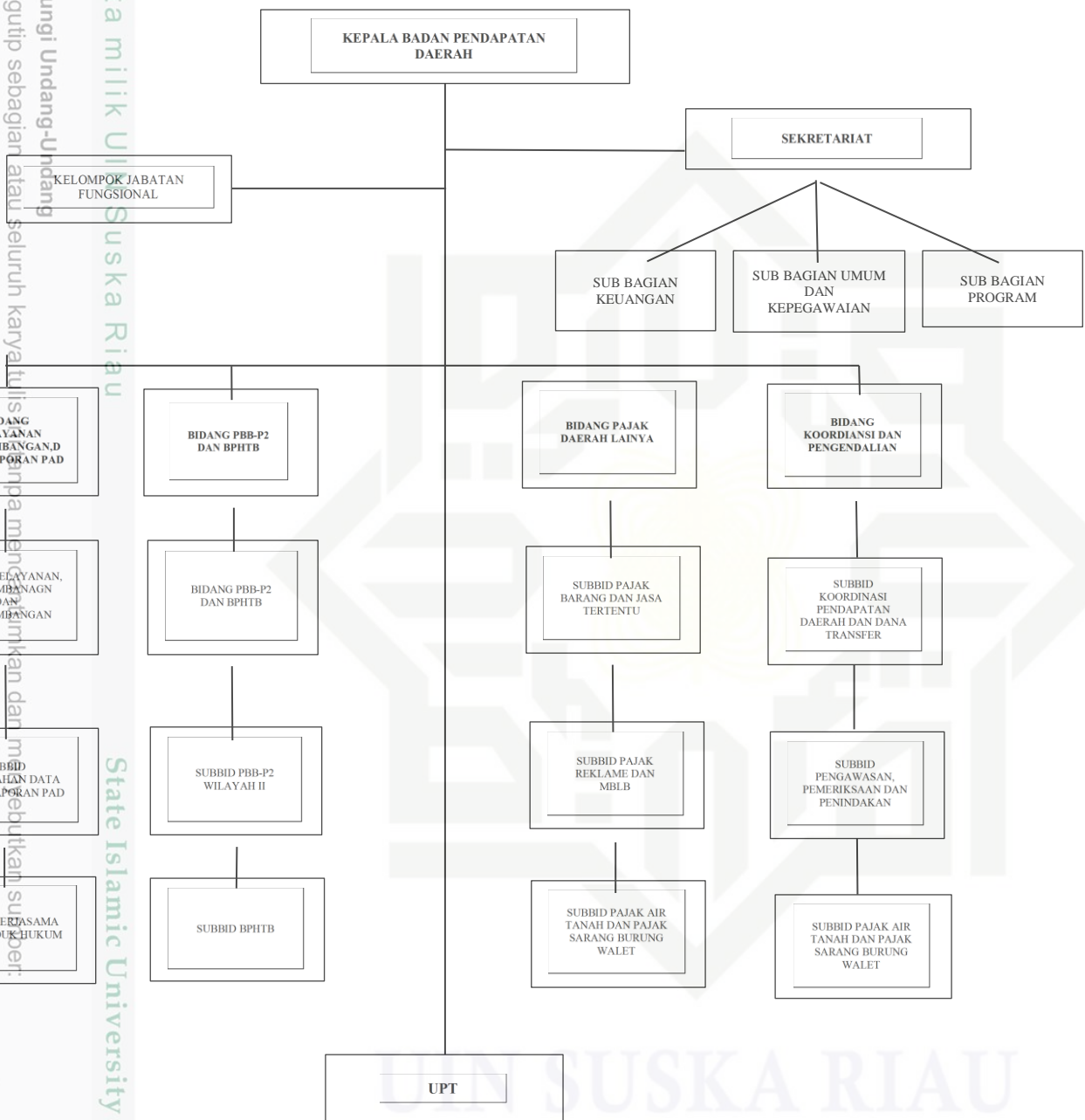
b. Misi

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Tersedianya aparatur yang handal dan profesional
3. Tersedianya data yang akurat dan tersinkronisasi
4. Meningkatkan kualitas layanan prima bagi masyarakat
5. Sistem pengelolaan administrasi dan manajemen yang berbasis Teknologi Informasi.

2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan 2025



2.4 Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

Adapun Uraian Tugas (*job description*) Bagian/Unit Kerja menurut Peraturan Walikota Pangkalan Kerinci Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pangkalan Kerinci, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Perda No.09 Tahun 2012.
- 2) Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
 - a) Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
 - b) Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c) Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
 - d) Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
- f) Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya;
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- 1) Merencanakan, Melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas umum, kepegawaian perlengkapan, keuangan, program hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tata laksana dan keamanan.
- 2) Sekretariat dibawah kedudukan dan bertanggung jawab kepada daerah.
 - a) Sekretariat terdiri dari :
 - I. Sub Bagian Program
 - II. Sub Bagian Umum
 - III. Sub Bagian Keuangan
- 3) Setiap Sub Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - a) Sub Bagian Pogram memiliki Tugas :
 - I. Menyusun Rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub bagian Program Berdasarkan Program kerja Sekretaria;
 - II. Mengkoordinasikan kegiatan dan program Dinas;
 - III. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Dinas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Sub Bagian dan Kepegawaian Mempunyai Tugas :

- I. Menyusun Rencana dan program kerja operasional Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja sekretariat
- II. Melaksanakan Kegiatan pelayanan administrasi umum dan rumah tangga serta administrasi kepegawaian.
- III. Melaksanakan tertip administrasi naskah Dinas;

c) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas :

- I. Menyusun Rencana dan Program Kerja operasional Subbagian Keuangan berdasarkan program kerja sekretariat;
- II. Menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
- III. Melaksanakan pengawasan laporan administrasi keuangan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan;

3. Bidang Pendaftaran dan Perhitungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai Tugas :

- a) Memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas dibidang pendaftaran dan perhitungan diantaranya melaksanakan pendapatan, pendaftaran, perhitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- b) Kepala Bidang Pendaftaran dan Perhitungan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bidang Pendaftaran Dan Perhitungan terdiri atas ;
 - a) Seksi Pendaftaran dan Pendapatan
 - b) Seksi Perhitungan
 - c) Seksi Penetapan
- c) Setiap Seksi diimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang.
1. Seksi Pendaftaran dan Pendapatan mempunyai tugas:
 - a) Menyusun rencana dan program Kerja operasional Seksi Pendaftaran dan pendataan berdasarkan program kerja bidang Pendaftaran dan Perhitungan;
 - b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - c) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi pendaftaran dan pendataan sebagai acuan / pedoman penyusunan rencana kegiatan;
4. Bidang Pendaftaran dan Perhitungan di pimppin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas :
 - a) Memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaaluasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang Pendafaran dan perhitungan diantaranya melaksanakan pendapatan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendaftaran, perhitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan yang telah

- b) Kepala Bidang Pendaftaran dan Perhitungan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c) Kepala Bidang Pendaftaran dan Perhitungan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

5. Bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan di pimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas :

- 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum;
 - c) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah;
 - d) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Pelaksanaan pengolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah
- g) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- h) Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan;
- i) Pelaksanan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum;
- j) Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan;
- k) Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- l) Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan;
- m) Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan;
- n) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai penyusun DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- p) Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai; Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- q) Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- r) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

6. Sub Bagian Keuangan

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan;
- c) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e) Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f) Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- g) Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h) Pelaksanaan akuntansi badan;
- i) Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
- j) Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran;
- k) Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l) Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya;
- m) Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Sub Bagian Program

- 1) Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub
 - c) Bagian Program;
 - d) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - e) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
- g) Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
- h) Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa;
- i) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Pajak Daerah I

- 1) Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- 2) Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- c) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan;
- d) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
- e) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ;
- f) Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2;
- g) Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
- h) Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- i) Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan;
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pajak Daerah I membawahi :

- a) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- b) Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.

- 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.

9. Bidang Pajak Daerah II

- 1) Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
- 2) Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 3) Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 4) Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 5) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar
- 6) induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan;
- 7) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 8) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan
 - a) Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah;
 - c) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah;
 - d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 9) Bidang pajak daerah II, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b) Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet;
 - c) Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.

10. Bidang Pengendalian Pajak Daerah

- 1) Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah;
- 2) Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah;
 - c) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d) Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan;
 - e) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah;
- g) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :

- a) Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- b) Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan;
- c) Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan.

- 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

11. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD

- 1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, Pembukuan PAD dan Legalisasi;
- 2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyetoran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga;
- c) Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan dalam Peningkatan PAD;
- d) Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e) Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD;
- f) Pengordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain;
- g) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah;
- h) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga;
- i) Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah;
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi :
 - a) Sub Bidang Hukum dan Kerjasama;
 - b) Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak;
 - c) Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.
- 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

12. Unit Pelaksanaan Teknis

- 1) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- 2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :
 - a) UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b) UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- 3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakilpemerintah pusat.

13. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- 4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara

lain :

1. Terdapat peningkatan jumlah wajib pajak hotel dari tahun ke tahun, pada tahun 2022-2023 wajib pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan ada 19 wajib pajak sedangkan di tahun 2024 terdapat penambahan 1 wajib pajak yang bertotal menjadi 20 wajib pajak. Pada tahun 2023, realisasi pajak hotel di Kabupaten Pelalawan mencapai Rp.2.685.506.072 dari target Rp.2.122.602.756, dengan persentase pencapaian sebesar 26,53%. Sementara itu, pada tahun 2024, realisasi pajak hotel mencapai Rp.3.037.351.478 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.2.122.602.756,. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa potensi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan setiap tahunnya.
2. Dalam proses pemungutan pajak hotel, terdapat beberapa kendala yang masih menjadi tantangan. Salah satu yang paling utama adalah rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Banyak pelaku usaha hotel yang belum memahami pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, sehingga mereka cenderung menunda atau bahkan mengabaikan kewajibannya. Selain itu, banyaknya tunggakan pajak juga menjadi permasalahan yang cukup serius. Beberapa hotel menunda pembayaran pajak mereka, baik karena alasan keuangan maupun kurangnya kesadaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan kewajiban tersebut. Hal ini menyebabkan jumlah piutang pajak semakin bertambah, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian target penerimaan pajak daerah. Tak hanya itu, ada juga hotel yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Beberapa pelaku usaha memilih untuk tetap beroperasi tanpa terdaftar secara resmi, baik karena kurangnya pemahaman mengenai regulasi pajak atau kesengajaan untuk menghindari kewajiban tersebut. Kondisi ini tentu merugikan daerah, karena potensi pendapatan pajak yang seharusnya bisa dikumpulkan menjadi hilang begitu saja. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pajak, memberikan sanksi yang lebih tegas kepada penunggak pajak, serta melakukan pengawasan lebih ketat terhadap usaha perhotelan yang belum terdaftar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penerimaan pajak dari sektor hotel dapat lebih optimal dan berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan daerah.

3. Untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel, pemerintah telah melakukan berbagai upaya strategis, seperti sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak agar lebih memahami pentingnya membayar pajak, sehingga kesadaran dan kepatuhan mereka meningkat. Selain itu, pemerintah juga memberikan peringatan dan teguran kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai langkah awal agar mereka segera melakukan pembayaran pajak. Tidak hanya itu, pengawasan dan penegakan hukum juga dilakukan terhadap pelaku usaha hotel yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, guna memastikan seluruh usaha perhotelan terdaftar dan membayar pajak sesuai aturan. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan penerimaan pajak hotel dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah.



4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan diatas maka masukan atau saran bagi Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Untuk wajib pajak hotel terutama pada daerah Kabupaten Pelalawan agar selalu ingat dan peduli terhadap pembayaran pajak agar daerah Kabupaten Pelalawan menjadi lebih maju dan juga itu merupakan kewajiban setiap wajib pajak.
2. Untuk penelitian selanjutnya semoga dapat menjadi bahan acuan dalam peneliti selanjutnya dan menyempurnakan penelitian ini.
3. Untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan dapat lebih dimaksimalkan lagi kinerja yang sudah ada sebelumnya. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau melalui media massa menjadi tempat untuk sumber informasi dan pemberitahuan tentang pentingnya membayar pajak untuk meningkat penerimaan pajak khusus nya di daerah Kabupaten Pelalawan. Serta selalu meningkatkan pengawasan dan bekerja sama dengan satuan tugas lapangan untuk selalu memantau dan memberi arahan kepada wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. 2014. Surah An – Nisa' ayat 29, Al – Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu
- Dwi Damas Anggoro.(2017) “Pajak dan Retribusi Daerah”:Universitas Brawijaya Press
- Fitriano, Y & Ferina. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 69-80
- Fungsi Pajak | Direktorat Jenderal Pajak' <<https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>> [di akses 18 Maret 2024].
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007uu.htm>
<https://bapenda.pekanbaru.go.id/layanan/hotel>
- Kamaroellah Agoes.(2021), “Pajak dan Retribusi Daerah : Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah”:Jakad Media Publishing
- Mardiasmo. 2019. PERPAJAKAN. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Andi, 2019
- Nono, V. R. M., & Tyas, A. M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm)(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua). *Soetomo Accounting Review*, 1(4), 618-636.
- Sofwan, S. V., Iqbal, M., & Ramadhan, S.(2021). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2013-2020. *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(3), 13-24.
- Sihombing Sotarduga, Susy Alestriani Sibagariang.(2020) ,Bandung “Perpajakan Teori dan Aplikasi”:Widina Bhakti Persada Bandung
- Simbolon, S., & Herijawati, E.(2023).Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang. *RUBINSTEIN*, 1(2), 52-62.
- Thian Alexander.“Hukum Pajak”. (Yogyakarta: Andi. 2021)
- Wahyudin, N., Fatimah, S., & Pascayanti, Y. (2022). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016–2020. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(1).
- Willy, S. (2020). pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD). *Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(2), 320-326.